

Newsletter Pusdatin



Daftar Isi

- Tingkatkan Kualitas Data Pusdatin Siapkan *Drone Filming* dan *Ground Survey* di Jawa Barat, Halaman 1
- Pusdatin Melakukan Pendampingan Penambahan Areal Tanam (PAT), Halaman 3
- Pusdatin Digitalisasi Lahan Hortikultura Di Brebes, Halaman 4
- Peningkatan Kualitas Data Produksi Kacang Hijau Melalui Perbaikan Metode Produktivitas, Halaman 5
- Pusdatin Berkontribusi Terhadap Satu Sistem Interoperabilitas Registrasi Sosial Ekonomi, Halaman 8
- Evaluasi Awal dan Progres Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024, Halaman 9
- Koordinasi Tim Evaluasi SPBE 2024 Kementan Masuk Dalam Tahap Penyiapan Bukti Dukung, Halaman 10
- Menteri Amran Ajak DWP Terus Menguatkan Program Kementan, Halaman 11

Mohon Kesediannya Untuk Mengis Survei Kepuasan



bit.ly/surveipusdatin

Tingkatkan Kualitas Data

Pusdatin Siapkan *Drone Filming* dan *Ground Survey* di Jawa Barat

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bersama dengan ID-Food, PT. RNI melakukan persiapan *Drone Filming* dan *Ground Survey* untuk pengumpulan data tebu di Provinsi Jawa Barat sebagai rangkaian pelaksanaan proyek hibah dari Korea Selatan. Persiapan tersebut diawali dengan koordinasi ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan PT. PG Rajawali II di Cirebon pada Kamis (16/05/2024). Melalui koordinasi ini disampaikan bahwa tim Pusdatin bersama tim EGIS Korea Selatan akan menerbangkan drone (*drone filming*) pada lahan tebu dan melakukan survei untuk mengumpulkan data produktivitas tebu di 3 kabupaten yaitu Cirebon, Majalengka dan Subang pada tanggal 27-31 Mei 2024.

Dari koordinasi ini disepakati bahwa tim akan dibagi 2 group yaitu grup *drone filming* dan grup survei lapangan. Untuk pelaksanaan di



Kepala Pusdatin (Kanan) memimpin koordinasi ke PT. PG Rajawali II Cirebon

Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom, MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Roydtul Zikria, S.Si, MSE
Suyati, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE
Iswadi

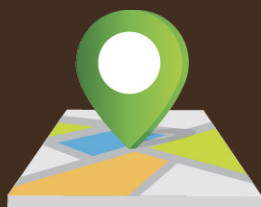
Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE
Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Cahyani Wartianingsih, S.Kom
Hotlanis Mangatur S, S.Kom
Nur Hikmah, S.Stat
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Priatna Sari
Mudino
Marwati
Agung Mahendra, S.Kom
M. Eko Darwanto

Alamat Redaksi



PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 78842029
e-mail : newsletter@pertanian.go.id



Tim Pusdatin berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

lapangan akan dilakukan secara paralel di setiap lokasi. PT. PG Rajawali II akan mengoordinir pabrik gula (PG) yang akan terlibat di lokasi penerbangan drone tersebut.

Teknis pelaksanaan *drone filming*, meliputi : (1) drone diterbangkan pada saat matahari sudah cukup cerah (jam 09:00 – 15:00), dimana drone akan diterbangkan oleh tim EGIS Korea Selatan; (2) di setiap lokasi, perkiraan waktu menerbangkan drone sekitar 3 jam (*finishing dan closing*); (3) jika pengumpulan data menggunakan drone tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari, maka akan dilanjutkan pada hari berikutnya; (4) drone sudah di lengkapi dengan *GPS Tracker*, jika drone mengalami kendala maka tim EGIS Korea Selatan dan tim ID-Food selaku supervisor akan terjun ke lapang untuk mengatasinya; dan (5) aplikasi untuk merekam data lapangan menggunakan aplikasi *GPS Web Camera*.

Teknis pelaksanaan *ground survey*, meliputi : (1) mobilitas tim *ground survey* dapat menggunakan mobil atau berjalan kaki tergantung lokasi di lapangan; (2) tugas tim *ground survey* adalah mengukur ketinggian dan diameter tanaman tebu; (3) satu lokasi *ground survey* masing-masing seluas 100 hektare akan diambil 9 titik sampel, setiap titik dibagi 3 tim karena masing-masing lokasi seluas 1,5 x 1,5 km, dimana masing-masing titik diambil sampel 4 batang tebu; dan (4) sebelum pelaksanaan survei, akan diadakan *Training of Trainer (ToT)* ke tim yang terlibat.

Penulis: Vera J. Siagian

Pusdatin Melakukan Pendampingan Penambahan Areal Tanam (PAT)



Kapusdatin dan tim dalam acara Bimtek PAT di Sumsel

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) sebagai penanggung jawab untuk sistem pelaporan kegiatan PAT turut hadir dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) penginputan data PAT di Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (30/04/2024). Adapun peserta bimtek meliputi : 1) Petugas Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi penanggung jawab kegiatan Kabupaten/Kota Lokasi PAT; 2) Petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

Bimtek ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Lukman Irwanto. Beberapa permasalahan yang didiskusikan pada bimtek ini antara lain: (I) Sebagian besar peserta bimtek masih kurang memahami konsep definisi dan kriteria kegiatan PAT, atau belum ada kesamaan persepsi antara tim pusat dengan tim pelaksana daerah terkait Program PAT tersebut; (II) Penanggung Jawab (PJ) kabupaten/kota masih belum memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya pada kegiatan PAT tersebut; (III) Terkait sistem pelaporan program, sebagian besar peserta masih kurang memahami kriteria-kriteria cakupan kegiatan PAT.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut tim Pusdatin menyarankan agar

bimbingan teknis dilaksanakan lebih intensif dan terjadwal antara pelaksana daerah dan PJ Provinsi dan Tim Pusat, antara lain bisa dilaksanakan melalui Zoom atau WhatsApp Group. Selain itu, perlu disusun buku petunjuk teknis program PAT yang memuat segala informasi terkait Program PAT antara lain konsep, definisi, kriteria, cakupan kegiatan, pengorganisasian dan lain sebagainya sehingga terdapat kesamaan persepsi antara tim pusat dan pelaksana daerah.

Untuk memudahkan petugas dalam melaporkan data ke aplikasi Laporan Utama, petugas diharapkan membuka akses Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Aplikasi Program PAT. “Juknis Aplikasi program PAT saat ini sudah tersedia pada tautan Aplikasi Program Utama Kementerian Pertanian. Untuk meminimalisir kesalahan penginputan data, para PJ wilayah dan petugas input data diharapkan mengunduh dan menggunakan juknis tersebut sebagai panduan dalam pelaporan data”, kata Rizkina selaku narasumber dari Pusdatin. Lebih lanjut narasumber pusdatin juga menyampaikan apabila PJ wilayah mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi pelaporan PAT, PJ wilayah dapat menghubungi nomor kontak tim Pusdatin yang tercantum pada file petunjuk teknis.

Penulis: Titin Agustina



Pusdatin Digitalisasi Lahan Hortikultura Di Brebes



Hasil pemetaan lahan hortikultura yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) melakukan pendampingan teknis pemetaan lahan pertanian hortikultura, di kabupaten Brebes, 13 Mei 2024. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui luasan lahan hortikultura di kabupaten Brebes secara spasial.

Ketua Tim Kerja Sosial, Sarana dan Prasarana, M.Subehi mengatakan komoditas hortikultura merupakan salah satu produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di bidang agribisnis. Komoditas hortikultura meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat.

Komoditas unggulan di subsektor hortikultura yang dimiliki Kabupaten Brebes antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, kentang dan wortel. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi komoditas hortikultura di Kabupaten Brebes adalah dengan melakukan pendataan lewat pemetaan lahan hortikultura. "Pemetaan lahan hortikultura dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Brebes melalui aplikasi geoportal pertanian yang difasilitasi oleh Pusdatin Kementan", kata Subehi dalam pendampingan pemetaan di Kabupaten Brebes.

Menurut Subehi, aplikasi Geoportal tersebut dapat diakses pada tautan <http://bit.ly/pemetaanlahanhortikultura> menggunakan akun yang telah ditentukan oleh Pusdatin Kementan.

Pada aplikasi Geoportal tersebut, terdapat *tools* yang dapat memfasilitasi proses digitasi, diantaranya adalah *legend* yang menunjukkan simbol dari data-data yang ditampilkan di Geoportal, *layers* yang berisi data batas administrasi dan *Google Map* sebagai dasar pengguna dalam melakukan digitasi, *Add Data* jika terdapat data spasial yang perlu untuk diinputkan ke dalam Geoportal, *Swipe* untuk perbandingan kenampakan di *Google Map* dan citra *trus color*, *download* jika perlu hasil dalam format offline, serta *smart editor* yang merupakan *tools* untuk mengedit hasil digitasi.

Selain pendampingan proses digitalisasi, juga dilakukan uji implementasi pengecekan lapangan dari hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil uji implementasi pengecekan lapangan, masih terdapat hasil pemetaan lahan hortikultura yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Hal ini terjadi karena beberapa komoditas hortikultura bisa juga ditanam pada area yang ditanami tanaman pangan. "Oleh karena itu untuk rencana pemetaan ke depan diperlukan integrasi antara pemetaan lahan pertanian hortikultura dengan lahan pertanian tanaman pangan", ujar Subehi.

Penulis: Aulia Azhar



Peningkatan Kualitas Data Produksi Kacang Hijau Melalui Perbaikan Metode Produktivitas

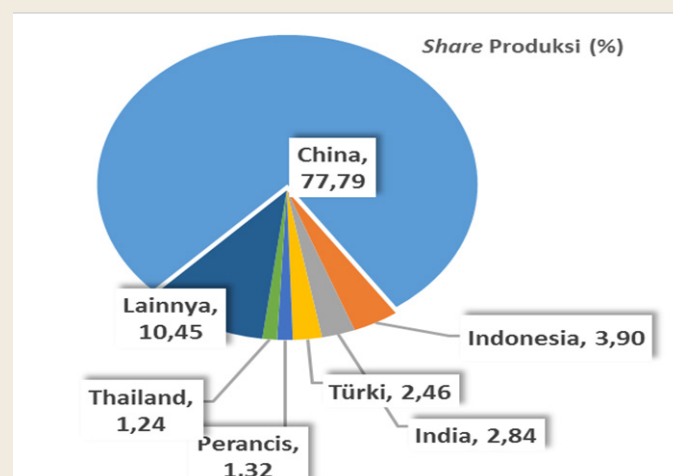
Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar penduduk Indonesia. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan pemerintah Indonesia dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 mencantumkan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Prioritas nasional ketahanan pangan tersebut diuraikan menjadi program prioritas peningkatan produksi pangan, serta program prioritas pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Salah satu kegiatan dalam program prioritas pembangunan sarana dan prasarana pertanian adalah kegiatan perbaikan data statistik pangan. Ketersediaan data statistik pangan yang berkualitas sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan.

Kacang hijau (*Vigna radiata*) merupakan tanaman palawija penting di Indonesia, karena merupakan sumber protein nabati. Kacang hijau memiliki kandungan gizi yang tinggi yaitu didominasi oleh karbohidrat dan protein. Kandungan protein kacang hijau sebesar 22 persen menempati urutan ketiga setelah kedelai dan kacang tanah (Purwono dan Hartono, 2005).

Produksi kacang hijau dunia bersumber dari data FAO dalam bentuk kacang lainnya (*others bean, green*). Produksi kacang hijau Indonesia rata-rata lima tahun menurut FAO mencapai *share* 3,90 persen atau kedua terbesar setelah China yang mencapai *share* rata-rata 77,79 persen per tahun. Posisi Indonesia tersebut masih lebih tinggi dari empat negara lainnya yaitu India, Turki, Perancis dan Thailand. Dari sisi luas panen, Indonesia berada di posisi keempat dunia dengan *share* 7,70 persen dari total luas panen kacang hijau dunia di bawah Thailand yang menempati urutan

kedua dengan *share* 10,51 persen. Namun jika dilihat dari sisi produktivitas, rata-rata hasil kacang hijau Indonesia masih relatif rendah yaitu hanya berada di posisi ke-46 dengan rata-rata produktivitas 7,51 ton per hektare, sementara China di posisi pertama dengan rata-rata produktivitas mencapai 27,37 ton per hektare.

Keragaan perdagangan kacang hijau Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2022 menunjukkan nilai perdagangan negatif atau nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor. Impor kacang hijau Indonesia tahun 2022 mencapai 99,33 ribu ton atau setara 105,07 juta US\$, sementara volume ekspor kacang hijau Indonesia hanya mencapai 18,54 ribu ton dengan nilai perdagangan mencapai 25,83 juta US\$. Impor kacang hijau Indonesia lebih dari 98 persen dalam bentuk kacang dari spesies *Vigna mungo* (L.) Hepper atau *Vigna radiata* (L.) Wilczek selain untuk disemai atau kode HS 07133190 yang 62 persen berasal dari Myanmar. Selain itu Indonesia juga mengimpor kacang hijau dari Ethiopia, China dan Thailand. Demikian halnya ekspor kacang hijau Indonesia ke beberapa negara antara lain yang cukup dominan adalah China, Taiwan, dan Philipina dalam bentuk kacang dari spesies *Vigna mungo* (L.) Hepper atau *Vigna radiata* (L.) Wilczek selain untuk disemai atau kode HS 07133190 atau jenis kacang hijau yang sama dengan jenis kacang hijau yang diimpor.

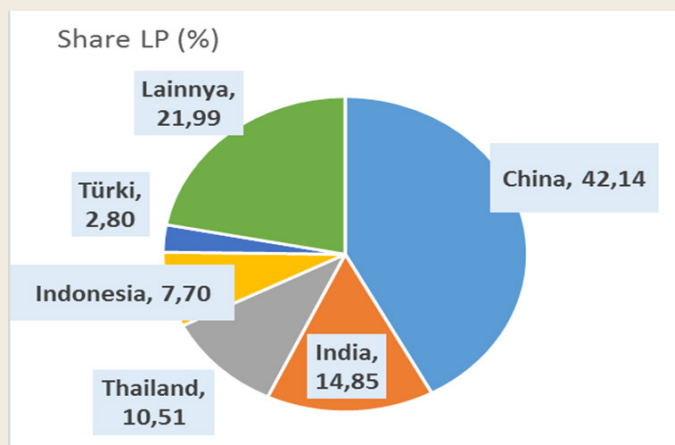


Share produksi kacang hijau dunia

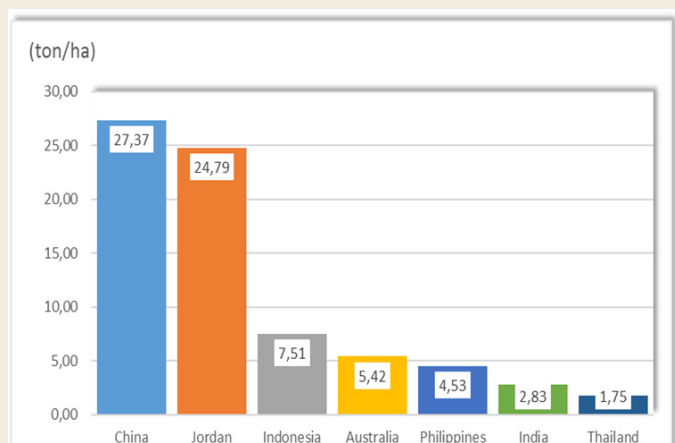
Keragaan data produksi kacang hijau nasional berdasarkan data Ditjen Tanaman Pangan rata-rata lima tahun terakhir mencapai 189,06 ribu ton yang

terkonsentrasi sangat signifikan di 2 provinsi yaitu Jawa Tengah sebesar 95,78 ribu ton atau mencapai *share* 50,66 persen, dan Jawa Timur dengan *share* 20,47 persen atau produksi rata-rata 38,71 ribu ton. Dua provinsi dengan *share* di atas 5 persen adalah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebesar 16,91 ribu ton dan 15,27 ribu ton.

Demikian halnya dengan keragaan luas panen yang terkonsentrasi di empat provinsi penyumbang produksi kacang hijau terbesar di Indonesia. Namun dari sisi hasil per hektare atau produktivitas, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penyumbang produksi kacang hijau terbesar masih lebih rendah dari provinsi non sentra seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Produktivitas kacang hijau terbesar di Sumatera Selatan yang mencapai 12,96 ton per hektare, sementara Jawa Tengah hanya berada di urutan keempat dengan rata-rata produktivitas 11,36 ton per hektare.



Share luas panen kacang hijau dunia



Rata-rata produktivitas kacang hijau dunia (ton/ha)

Berdasarkan studi oleh Nurita Elviyanti Ningsing dkk tentang Analisis Daya Saing Kacang Hijau (*Vigna Radiata*) Indonesia di Pasar Internasional menunjukkan bahwa komoditas kacang hijau Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional yang ditandai dengan rata-rata nilai indeks *Revealed Comparative Advantage* (RCA) 2,19. Daya saing Indonesia cenderung lebih baik dari pada Australia, China dan Thailand, walaupun demikian daya saing Indonesia masih berada jauh di bawah Myanmar. Konsep dasar RCA adalah mengukur keunggulan komparatif komoditas suatu negara yang direfleksikan dari nilai eksportnya. Dalam analisis tersebut dihitung nilai RCA masing-masing negara eksportir kacang hijau untuk dibandingkan keunggulan komparatifnya. Berdasarkan potensi daya saing komoditas kacang hijau tersebut di pasar internasional, peningkatan *suplay* perlu ditingkatkan baik melalui peningkatan areal tanam atau ekstensifikasi maupun peningkatan produktivitas atau intensifikasi.

Data kacang hijau dikumpulkan secara sensus dari seluruh kecamatan di Indonesia oleh petugas pengumpul data pertanian di tingkat kecamatan. Agak berbeda dengan data tanaman pangan/palawija lainnya, data produksi kacang hijau diperoleh berdasarkan laporan SP-Palawija bersamaan dengan laporan data luasan (luas tanam, luas panen dan luas kerusakan/puso), sementara data produksi palawija lainnya diperoleh berdasarkan perhitungan antara data luas panen dengan data produktivitas yang diperoleh berdasarkan survei sampling per empat bulan (subround) melalui survei ubinan. Kelemahan pengumpulan data produksi berdasarkan pencacahan lengkap sebagaimana data luasan yang saat ini dilakukan adalah data yang cenderung bias dengan tingkat kesalahan pengumpulan data tidak bisa terukur.

Karakteristik tanaman menjadi salah satu alasan mengapa komoditas kacang hijau menjadi satu-satunya komoditas palawija utama yang pengumpulan data hasil per hektarnya tidak melalui survei ubinan. Metode pemanenan tanaman

kacang hijau adalah dipanen secara bertahap atau dipanen secara berulang sehingga menyulitkan untuk mengukur produktivitas menggunakan metode yang sama dengan komoditas tanaman pangan lainnya. Data produktivitas atau hasil per hektare komoditas padi dan palawija saat ini melalui survei ubinan secara sampel menggunakan kerangka besi stainless berukuran 2,5 m x 2,5 m pada area pertanaman yang dipilih secara acak.

Hasil rapat koordinasi terkait pengelolaan data komoditas palawija khususnya data komoditas kelompok aneka kacang dan umbi (AKABI) antara Kementerian Pertanian (Sekertariat Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, dan Pusdatin) pada bulan Februari 2023 mengagendakan salah satu bahasan terkait akurasi data produksi kacang hijau. Keragaan data produksi kacang hijau saat ini berdasarkan pelaporan petugas menggunakan daftar SP-Palawija dengan pendekatan beberapa metode (salah satunya metode pencatatan dari beberapa sumber informasi) menghasilkan data dengan *range* yang sangat lebar antar kecamatan dalam satu kabupaten, maupun antar kabupaten, sehingga diduga data yang didapat cenderung kurang akurat. BPS menghimbau agar Kementerian Pertanian mulai mengagendakan pembahasan metode pengumpulan data kacang hijau pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Salah satu agenda pembahasan adalah metode pengumpulan data produktivitas kacang hijau sebagai alternatif pengganti metode pengumpulan data produksi saat ini, sementara pengumpulan data luas panen masih mengacu pada metode yang saat ini masih berjalan. Perubahan metode pengukuran produktivitas kacang hijau menggunakan metode yang paling mendekati kondisi lapang diharapkan mampu menghasilkan data produksi kacang hijau yang akurat dan terkini dengan tingkat kesalahan yang terukur.

Berdasarkan kajian pengelolaan data dan keragaan data kacang hijau saat ini,

beberapa usulan atau rekomendasi terkait kebijakan dan pengelolaan data kacang hijau adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian melalui Pusdatin, dan direktorat terkait yaitu Direktorat Aneka Kacang dan Umbi serta Badan Pusat Statistik perlu duduk bersama untuk membahas upaya peningkatan akurasi data produksi kacang hijau melalui peningkatan akurasi produktivitas kacang hijau.
2. Melakukan pembahasan metode pengumpulan data produktivitas kacang hijau menggunakan metode pengukuran secara langsung di lapangan melalui survei sampling sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dengan tingkat kesalahan yang bisa diukur.
3. Melakukan uji metode pengukuran produktivitas kacang hijau menggunakan beberapa metode pengukuran misalnya : penghitungan 5 X 5 rumpun atau 10 x 10 rumpun atau metode pengukuran produktivitas yang pernah diuji untuk tanaman panen berulang guna mendapatkan metode pengukuran yang paling mendekati kondisi sebenarnya.
4. Selain melakukan uji metode pengukuran produktivitas, perlu dilakukan uji komparasi beberapa metode pengukuran produktivitas untuk mengukur validitas hasil masing-masing metode terhadap hasil sebenarnya (*true value*). Metode yang terpilih merupakan metode pengukuran produktivitas yang paling ideal dan paling memungkinkan untuk diterapkan di lapang.
5. Uji komparasi metode produktivitas terpilih perlu dilakukan di beberapa wilayah/lokasi untuk mendapatkan metode pengukuran produktivitas kacang hijau yang paling sesuai di lapangan.

Penulis: Takariyana Heni A.

Pusdatin Berkontribusi Terhadap Satu Sistem Interoperabilitas Registrasi Sosial Ekonomi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Walidata Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sedang melakukan pengembangan sistem data dan interoperabilitas Regsosek antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk mendukung pengembangan tersebut, setiap K/L dan Pemda melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melakukan identifikasi terhadap program atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pemetaan indikator variabel bagipakai data yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektoral.

Regsosek mencakup 100 persen penduduk Indonesia mampu menunjukkan status kesejahteraan dari termiskin hingga terkaya sehingga Regsosek dijadikan basis data sosial ekonomi. Pendataan Regsosek tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian datanya diserahkan ke Bappenas.

Satu sistem interoperabilitas Regsosek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data sehingga dapat menghindari duplikasi data, memperkuat basis data sehingga pemerintah dapat lebih akurat menggunakan data dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa program yang diberikan oleh pemerintah menysasar kelompok yang tepat, adanya integrasi dengan sistem lain sehingga dapat memberikan layanan yang holistik, dan dapat mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti yang lebih kuat. Interoperabilitas data ini adalah kemampuan data untuk dibagipakai antar sistem yang saling berinteraksi.

Regsosek terdiri dari informasi profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia yang akan secara rutin dimutakhirkan dan dikelola di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kapasitas dan tingkat akurasi

Model Interoperabilitas Data Regsosek dengan Data Instansi Pemerintah Pusat



Model interoperabilitas data Regsosek dengan data Instansi pemerintah pusat

yang baik, Regsosek mendukung upaya perencanaan, penganggaran, dan pengendalian yang berbasis bukti dan data sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian berbagai target pembangunan. Cakupan informasi Regsosek juga akan mendukung proses perencanaan multisektor di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, perumahan dan permukiman, pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, hingga penegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Pusdatin Kementerian Pertanian melakukan identifikasi terhadap program atau kegiatan yang ada di Eselon I Kementan berkaitan dengan perlindungan sosial yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan sistem interoperabilitas Regsosek. Ada dua program yang diusulkan untuk masuk sistem interoperabilitas Regsosek yaitu Pupuk Subsidi dan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) baik pra panen maupun pasca panen. Kedua program tersebut diberikan informasi yang diperlukan untuk sistem interoperabilitas Regsosek diantaranya program penyaluran pupuk yang mendapat subsidi untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah untuk mendorong produktivitas para petani serta program bantuan alat dan mesin pertanian merupakan salah satu bentuk intervensi langsung pemerintah. Bantuan ini diharapkan penerima manfaat dapat mengelola dengan baik serta pemanfaatan alsintan yang optimal sehingga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas pangan.

Penulis: Hety S

Evaluasi Awal dan Progres Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024



Perwakilan TPI Kementan menghadiri Evaluasi Awal dan Progres Penilaian EPSS 2024

Evaluasi awal dan progres penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024 dimulai dengan sambutan oleh Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto dan paparan tentang Pembahasan Evaluasi Awal dan Progres Penilaian EPSS 2024 oleh ketua tim pelaksana EPSS. Acara dihadiri oleh Perwakilan Tim Penilai Internal (TPI) dari Kementerian/Lembaga Instansi Pusat dan Instansi Daerah secara daring (zoom).

Dalam sambutannya Atqo Mardiyanto menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan EPSS 2024. “EPSS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral”, ujar Sekretaris Utama BPS.

“EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah”, tambah Atqo.

TPI segera menyelesaikan penilaian mandiri di instansinya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Tim Pelaksana EPSS mengawal dan memantau setiap tahapan penilaian EPSS sampai dengan dikeluarkannya hasil EPSS 2024. Seluruh koordinator diharapkan terus meningkatkan komunikasi kepada mitra agar pemahaman dan tujuan dari pelaksanaan EPSS dapat tersampaikan dengan baik kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Penjaminan Kualitas segera menyiapkan strategi-strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan penjaminan kualitas di setiap tahapan penilaian EPSS.

Berdasarkan hasil evaluasi awal dan progres penilaian EPSS 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024, ada 78 instansi pusat, 34 pemerintah provinsi dan 468 pemerintah kabupaten/kota telah melakukan registrasi akun pada Portal EPSS.

Berdasarkan *timeline* EPSS 2024, penilaian mandiri oleh TPI di instansi pemerintah terhitung tanggal 1 April sampai 31 Mei 2024 (*deadline* pengiriman hasil penilaian mandiri oleh TPI tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00). Penilaian dokumen oleh Tim Penilai Badan (TPB) dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan ketiga Juni 2024. Sementara itu penilaian interviu dilaksanakan pada minggu keempat Juni sampai minggu kedua Juli 2024. Selanjutnya dilakukan penilaian visitasi pada minggu ketiga Juli sampai minggu pertama Agustus. Proses harmonisasi dilaksanakan pada minggu kedua Agustus sampai minggu keempat Agustus 2024.

TAHAPAN	April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1 Persiapan																
- Entry meeting																
	https://s.bps.go.id/EntryMeetingEPSS24															
2 Pelaksanaan																
- Penilaian Mandiri di Instansi Pemerintah																
- Penilaian Dokumen																
- Penilaian Interviu																
- Penilaian Visitasi (opsional)																
- Harmonisasi																
3 Penyusunan Laporan dan Finalisasi																
- Laporan Hasil dan Rekomendasi																
- Finalisasi																

Timeline pelaksanaan penilaian EPSS 2024

Penulis: Sehusman

Koordinasi Tim Evaluasi SPBE 2024 Kementan Masuk Dalam Tahap Penyiapan Bukti Dukung



Rapat Koordinasi Penyiapan Bukti dukung Evaluasi SPBE

Dalam rangka persiapan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pertanian Tahun 2024, dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyiapan Bukti Dukung Evaluasi SPBE Kementerian Pertanian yang diselenggarakan di Pusdatin pada tanggal 23-24 April 2024. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Intan Rahayu berpesan tentang pentingnya SPBE bagi Kementan dan target peningkatan indeks SPBE Kementan. “Tim Evaluasi SPBE Kementan perlu segera mulai menyiapkan bukti dukung untuk menghadapi evaluasi SPBE tahun ini yang prosesnya akan dimulai pada bulan Mei,” pesan Intan dalam sambutannya.

Pada rapat koordinasi tersebut terdapat dua agenda, pertama, pembahasan penyiapan bukti dukung Evaluasi SPBE Kementerian Pertanian 2024 dengan Penanggung Jawab (PJ) Indikator dari Eselon II. Kedua, Bimtek Penyusunan Narasi Bukti dukung Evaluasi SPBE Kementerian Pertanian 2024. Pada hari pertama (23/4) yang diundang 6 unit Eselon II, yaitu: Biro Umum dan Pengadaan, Biro Hukum, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Balai Embrio Ternak Cipelang. Sedangkan pada hari kedua yang diundang 3 unit Eselon II, yaitu : Biro Perencanaan, Biro Organisasi

dan Kepegawaian, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berkenaan dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, untuk memastikan tercapainya target penerapan SPBE, pada tahun 2024 Kementerian PANRB akan kembali melakukan Evaluasi SPBE pada seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Untuk pemberitahuan kegiatan dan informasi jadwal kegiatan akan disampaikan Kementerian PANRB kemudian melalui Surat Menteri PANRB kepada seluruh pimpinan IPPD.

Jadwal sementara untuk rangkaian kegiatan Evaluasi SPBE Nasional tahun 2024, diawali pada bulan Mei. Sosialisasi pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024 kepada seluruh IPPD yang diselenggarakan secara online. Mei-Juni, Penilaian Mandiri oleh seluruh IPPD melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE yang dapat diakses pada tautan tauval.spbe.go.id. Bulan Juli, Penilaian Dokumen oleh Asesor Eksternal terhadap hasil Penilaian Mandiri IPPD. Bulan Agustus, Penilaian Interview antara Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal IPPD. Bulan Oktober-November, Penilaian Visitasi Asesor Eksternal dan Tim Koordinasi SPBE ke lokus penilaian (apabila diperlukan). Bulan November, Konsolidasi dan Harmonisasi Hasil Penilaian dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional. Bulan Desember, Penyusunan Laporan Analisis, Rekomendasi, dan Hasil Evaluasi.

Kementerian Pertanian menjadi salah satu lokus evaluasi sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 229 Tahun 2024 tentang Lokus Evaluasi SPBE Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024. Mekanisme pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan melalui tahapan Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Wawancara, dan Penilaian Visitasi (jika diperlukan). Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen Nomor 991 Tahun 2024 tentang Tim Asesor Internal Penilaian

Mandiri Penerapan SPBE Lingkup Kementan Tahun 2024.

Adapun tugas dari Tim Asesor Internal dalam rangka evaluasi SPBE Kementan TA.2024 (evaluasi mandiri maupun evaluasi KemenPANRB), PJ/PIC Indikator melakukan penyiapan bukti dukung sebagai bukti dukung evaluasi SPBE (Sesuai Pedoman Evaluasi SPBE KemenPANRB). PJ/PIC Pusdatin melakukan pendampingan dan pembahasan yang intensif kepada PJ Satker melalui rapat koordinasi tim asesor internal. PJ Indikator mengisi narasi dan mengupload data/dokumen pendukung ke gdrive yang telah disediakan. PIC Pusdatin memastikan penulisan narasi sudah sesuai dengan kaidah penulisan penjelasan, kemudian melakukan validasi terhadap bukti dukung yang diunggah. PIC Pusdatin menuangkan narasi yang telah disusun oleh PJ Indikator (Checklist Narasi dan Bukti Dukung SPBE 2024) ke dalam format word. PIC Pusdatin mengisi narasi dan mengupload data/dokumen pendukung ke aplikasi Tauval SPBE. Penanggung jawab aspek memastikan narasi dan data/dokumen pendukung ke aplikasi Tauval SPBE yang diunggah sudah sesuai.

Untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian baik internal maupun eksternal, PJ Indikator dalam memberikan penjelasan agar mengacu pada kaidah yang telah ditentukan pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Menteri Amran Ajak DWP Terus Menguatkan Program Kementan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertanian (DWP Kementan) untuk mendukung program-program Kementan. Hal ini penting mengingat suami dan keluarga ASN kementan lebih banyak bekerja di lapangan untuk memastikan program yang di jalankan benar benar berjalan dengan baik.

“Selamat datang di Makassar dan

Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Masing-masing domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda. PJ Indikator menyusun narasi dan mengunggah bukti dukung evaluasi pada file Checklist dan Narasi Bukti dukungce SPBE 2024 pada *link* yang disediakan. PJ Indikator diharapkan memastikan bukti dukung setiap indikator yang diunggah sesuai dengan persyaratan untuk masing-masing level.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mencapai target penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024. Melalui koordinasi yang intensif, penyusunan bukti dukung, dan pelaksanaan tahapan evaluasi yang ketat, diharapkan Kementerian Pertanian dapat meningkatkan indeks SPBE secara signifikan. Keberhasilan dalam evaluasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan elektronik di Kementerian Pertanian tetapi juga menjadi bagian penting dalam pencapaian target nasional SPBE. Seluruh tim dan unit yang terlibat diharapkan bekerja sama dengan baik untuk memastikan setiap tahapan berjalan lancar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Kementerian Pertanian dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Penulis: Nugroho S

terimakasih sudah memenuhi undangan silaturahmi kami. Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan istri pejabat dan ASN Kementan kepada para suaminya", kata Mentan saat acara silaturahmi DWP Kementan di Makassar, Sabtu (11/05/2024). Acara silaturahmi ini diikuti Ketua Dewan Penasihat DWP Kementan Martati Amran Sulaiman, Ketua DWP Kementan Andriana Prihasto beserta perwakilan 9 DWP unsur pelaksana atau Eselon I lingkup Kementan.

Dalam kesempatan itu Menteri Amran juga menyampaikan permohonan maaf



Silaturahmi bersama Mentan dan Istri pejabat eselon I

jika dalam bekerja menyita lebih banyak waktu untuk mendukung program Kementan daripada waktu bagi keluarga. Hal ini semata-mata sebagai bagian dari upaya Kementan untuk menjalankan tugasnya meningkatkan produksi pangan.

Amran menyadari tanggung jawab dari DWP Kementan sebagai bagian dari DWP pusat yang merupakan organisasi masyarakat (ormas) perempuan terbesar di Indonesia. Dimana DWP harus memiliki *Standing Position* dan mengambil peran strategis dalam konstelasi pembangunan pertanian. DWP selalu berusaha menyesuaikan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi yang sejalan dengan arahan dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam kunjungan kerja ini DWP Kementan mengunjungi berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementan yang berada di Sulsel, antara lain Balai Besar Veteriner (BBVET) Maros, Balai Besar Pengujian Standar Instrument (BPSI) Tanaman Serealia, dan pameran galeri UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Terkait kunjungan DWP Kementan ke BBVET Maros ini dipimpin oleh Andriana Prihasto selaku Ketua DWP Kementan. Di sana rombongan DWP Kementan diterima oleh Kepala Balai BBVet Maros drh. H. Agustia, M.P. "Kami telah melayani masyarakat dalam hal pengujian veteriner dan produk hewan sejak tahun 1973", kata Agustia saat menerima rombongan di aula halaman kantor BBVET Maros.

Dalam kesempatan itu Agustia menjelaskan kilas balik dan sejarah UPT yang dipimpinnya ini. Selanjutnya dia mengajak rombongan DWP Kementan melihat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner untuk mengenal pengujian yang dilakukan demi mendukung peredaran bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) di masyarakat.

Berikutnya, DWP Kementan mengunjungi BPSI Tanaman Serealia dan disambut oleh Kepala Balai DR. Amin Nur, S.P., M.Si. Di sana DWP Kementan serta para istri pejabat Eselon 1 Kementan melakukan tanam jagung bersama di halaman kantor BPSI Tanaman Serealia. "Varietas yang kita tanam ini merupakan jenis jagung yang toleran terhadap kekeringan, varietas Jharing", jelas Amin.

Amin juga menyampaikan bahwa DWP yang merupakan wadah organisasi para istri ASN mempunyai peran penting yang mendukung program kerja instansi khususnya sektor pertanian.

Kunjungan terakhir dilakukan rombongan DWP Kementan ke kantor APINDO wilayah Sulawesi Selatan. Visi dari APINDO adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja. Banyak UMKM yang menjadi binaannya, dimana produk yang dihasilkan dapat dipasarkan di galeri APINDO. "Banyak produk yang dihasilkan oleh anggota DWP UPT Kementan di Sulawesi Selatan juga menjadi bagian dari produk yang dipasarkan di Sentra UMKM APINDO Sulawesi Selatan" kata pengurus APINDO Sulsel.

Penulis: Wieta B



Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian

satudata.pertanian.go.id